

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Baskoro, B. D. (2008). *Buku ajar: Hukum pidana lanjut*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. PT Sangir Multi Usaha.

Chazawi, A. (2008). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. PT Radja Grafindo Persada.

Dwija, P. (2006). *Pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.

Kasmanto, R. (2011). *Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Lamintang, T. (2010). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Suteki, G. T. (2022). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Rajawali Pers.

Syaiful, B. (2002). *Perkembangan sistem pidana Indonesia*. Total Media.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Wati, E. R. (2020). *Hukum pidana*. UMSIDA Press.

JURNAL ILMIAH

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital*. Jurnal Sapientia et Virtus, 7(2).
Direktorat Statistik Ketahanan Nasional. (2024). *Statistik kriminal 2024*. Badan Pusat Statistik, 15.

- Jufri, E. A. (2017). Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *Jurnal Hukum*, 8(1).
- Khalimy, A. (2020). Makna aturan peralihan sebagai politik hukum RUU KUHP (Transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2).
- Mastija, H. (2016). Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Mohd. Yusuf Daeng, M. (2023). Faktor penegak hukum yang terdapat dalam praktik hukum acara pidana. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Osgar, S. M. (n.d.). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif keadaan darurat. *Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*.
- Panggih, P. S. (2024). Well being pada narapidana: Sebuah analisis bibliometrik. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(1).
- Poluan, J. C., Antow, D. T., & Gerungan, L. K. F. R. (2024). Analisis yuridis reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Lex Privatum*, 14(2).
- Pratiwi. (2022). Urgensi alternatif pemidanaan pengganti pidana penjara demi tercapainya tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Putri, D., Lyestie, M. A., Marini, F., & Tia, L. (2023). Peranan lembaga pemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam membantu proses reintegrasi sosial narapidana. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Humaniora*, 1(2), 1–25.
- Rahmat, D., Santoso, B. N. U., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*.
- Reksodiputro, M. (2006). POLMAS ditinjau dari aspek yuridis dan implementasi penegakan hukum. *Jurnal Polisi Indonesia*, 8.
- Rinaldi, K. (2011). *Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

- Roni Sulistyanto, L. (2021). Pemenuhan jaminan kesehatan oleh perusahaan dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2).
- Roni Sulistyanto, L. (n.d.). Penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Meta-Yuridis*.
- Sari, E. P. (2009). Proses penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Juliana, S. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1), 25-40.
- Suseno, B. (2016). Lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu (Studi khusus tentang Lapas Terbuka Kendal). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Tarekh, C. D. N., Rochaeti, R. B., & Sularto. (2016). Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Yuliana, N. (2021). Pembinaan kemandirian dalam membangun kepercayaan diri narapidana di masa pandemi Covid-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).

PERATURANG PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Indonesia.